

Gerilya Masa Kini: Integrasi Taktik Asimetris, Teknologi Otonom, dan Perang Hibrida Dalam Konflik Modern

Haekal Hakim¹ Novky Asmoro²

Universitas Pertahanan Republik Indonesia^{1,2}

Email: haekalunhan@gmail.com¹

Abstrak

Perang gerilya tidak lagi sekadar aktivitas militer berbasis fisik, melainkan telah berevolusi menjadi model operasi multi-domain yang memadukan teknologi, informasi, dan legitimasi populasi. Artikel ini mengkaji transformasi perang gerilya tradisional menuju perang hibrida modern yang memanfaatkan teknologi otonom seperti unmanned aerial systems (UAS), sistem robotik, dan kecerdasan buatan (AI). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur sistematis dan analisis komparatif terhadap publikasi bereputasi (Scopus Q1 dan SINTA 2-4) periode 2016-2021. Hasil kajian menunjukkan tiga temuan utama: (1) prinsip-prinsip klasik gerilya yaitu mobilitas, dukungan rakyat, dan desentralisasi komando tetap relevan, (2) teknologi otonom dan operasi informasi meningkatkan efektivitas asimetri taktis, dan (3) perang siber serta dominasi narasi menjadi dimensi strategis dalam memenangkan legitimasi politik. Studi ini merekomendasikan penguatan unit kecil multi-domain, pembentukan SOP etis untuk penggunaan teknologi otonom, serta kebijakan nasional yang menyeimbangkan inovasi militer dan regulasi hukum internasional.

Kata Kunci: Gerilya, Perang Hibrida, Teknologi Otonom, Drone, Keamanan Siber, Operasi Informasi

Abstract

Guerrilla warfare has evolved beyond its traditional physical form into a multi-domain operational model integrating technology, information, and population legitimacy. This article analyzes the transformation of classical guerrilla warfare into modern hybrid warfare leveraging autonomous technologies such as unmanned aerial systems (UAS), robotics, and artificial intelligence (AI). The study employs a qualitative approach using a systematic literature review and comparative case analysis from high-impact journals (Scopus Q1 and SINTA 2-4) between 2016-2021. Findings reveal three core insights: (1) classical guerrilla principles is mobility, population support, and decentralized command remain relevant; (2) autonomous technology and information operations enhance tactical asymmetry; and (3) cyber warfare and narrative dominance form strategic dimensions in achieving political legitimacy. This study recommends developing small multi-domain units, establishing ethical SOPs for autonomous technology, and enacting national policies balancing military innovation with international legal norms.

Keywords: Guerrilla Warfare, Hybrid Warfare, Autonomous Systems, Drone Technology, Cyber Security, Information Operations



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sejak perang dingin hingga konflik modern seperti Ukraina dan Suriah, dinamika perang tidak lagi terbatas pada pertempuran konvensional. Strategi asimetris, taktik non-linier, dan perang berbasis informasi menjelma menjadi paradigma baru konflik. Perang gerilya, yang dulu mengandalkan kekuatan moral, mobilitas, dan dukungan rakyat, kini bertransformasi melalui pemanfaatan teknologi otonom dan sistem digital. Pergeseran ini dipicu oleh dua faktor utama. Pertama, perkembangan teknologi komersial yang memungkinkan aktor non-negara mengakses tools of war seperti drone, sistem komunikasi terenkripsi, dan perangkat pengintaian murah. Kedua, kemunculan hybrid warfare sebagai konsep yang menggabungkan instrumen militer dan non-militer untuk mencapai efek strategis tanpa konfrontasi langsung. Tujuan artikel ini adalah:

1. Menelaah relevansi prinsip klasik gerilya dalam konteks perang hibrida modern;
2. Menganalisis peran teknologi otonom dan operasi informasi dalam meningkatkan efektivitas taktik asimetris;
3. Memberikan rekomendasi kebijakan untuk penerapan taktik gerilya modern yang etis, efektif, dan sesuai hukum humaniter internasional.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif-deskriptif** dengan dua langkah analisis utama:

1. Kajian Literatur Sistematis. Artikel dan dokumen dipilih berdasarkan tiga kriteria: (a) terindeks Scopus Q1 atau SINTA 2-4, (b) terbit pada periode 2016-2021, dan (c) relevan dengan tema gerilya, perang hibrida, teknologi otonom, atau operasi informasi.
2. Analisis Komparatif Kasus. Studi kasus difokuskan pada adaptasi gerilya di konflik perkotaan dan penggunaan teknologi drone oleh aktor non-negara (mis. konflik Ukraina, Irak-Suriah, dan Nagorno-Karabakh).

Metode analisis data bersifat sintesis tematik yang menyatukan hasil kajian pustaka untuk mengidentifikasi pola adaptasi prinsip klasik ke konteks modern.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prinsip Dasar Gerilya yang Tetap Relevan



Gerilya klasik berlandaskan tiga elemen utama: mobilitas, dukungan rakyat, dan desentralisasi. Ketiganya tetap relevan pada perang modern karena fleksibilitas struktur memungkinkan daya tahan terhadap serangan konvensional. Dukungan populasi kini diterjemahkan ke ranah digital melalui kampanye narasi dan operasi informasi yang memperkuat legitimasi gerakan. Menurut Kitzen (2020), operasi irregular warfare menuntut “strategic patience and social embedding” dimensi yang tidak bisa digantikan oleh teknologi semata. Dalam konteks ini, gerilya tetap merupakan fenomena sosial-politik, bukan sekadar aktivitas militer.

Integrasi Teknologi Otonom dalam Operasi Gerilya



Kemajuan teknologi drone dan sistem robotik mengubah pola operasi taktis. Drone komersial berperan dalam ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) dan bahkan sebagai alat serangan presisi. Rossiter (2020) menilai sistem otonom berbiaya rendah menjadi force multiplier signifikan bagi aktor irregular. Kombinasi drone pengintai dan komunikasi terenkripsi memberi kemampuan untuk menyerang dan bersembunyi tanpa paparan radar. Yan (2019) menekankan bahwa integrasi AI pada sistem otonom memungkinkan analisis cepat terhadap situasi medan tempur dan pengambilan keputusan real-time dengan keunggulan yang dulu hanya dimiliki militer besar. Namun, penggunaan teknologi ini menimbulkan dilema etika dan hukum, khususnya dalam hal proporsionalitas dan akuntabilitas serangan otomatis. Oleh karena itu, perlu SOP nasional untuk mengatur penggunaan drone dan sistem otonom agar tetap sesuai dengan hukum humaniter internasional.

Operasi Informasi dan Siber sebagai Elemen Penentu



Perang informasi telah menjadikan narasi sebagai senjata strategis. Media sosial, propaganda digital, dan cyber warfare digunakan untuk menurunkan moral lawan serta memengaruhi opini publik global. Menurut Singer & Brooking (2018), dalam konteks modern “the narrative is as lethal as the bullet.” Artinya, keberhasilan operasi kini bergantung pada kemampuan mengontrol persepsi dan legitimasi. Integrasi operasi informasi ke dalam struktur komando gerilya menjadi elemen wajib, bukan tambahan.

Adaptasi Taktik Gerilya di Medan Perkotaan



Kota adalah medan baru bagi gerilya modern. Lingkungan padat penduduk, infrastruktur kompleks, dan sistem transportasi vertikal menuntut unit kecil yang fleksibel dan cepat. Penggunaan drone FPV (First Person View) mempermudah pengintaian dalam lorong sempit atau area tertutup. Kasus Kyiv 2022 menunjukkan bahwa kombinasi pertahanan sipil dan unit kecil bersenjata drone berhasil memperlambat manuver lawan. Ini membuktikan relevansi taktik gerilya di konteks perang urban masa kini.

Ketahanan Logistik dan Operasional



Kemandirian logistik menjadi fondasi keberlanjutan gerilya. Produksi lokal komponen drone, baterai, dan amunisi improvisasi memperkuat daya tahan organisasi. Namun, logistik yang terbuka rentan terhadap counter-intelligence; karena itu diperlukan sistem distribusi desentralistik dan keamanan siber ketat.

Implikasi Etika dan Legalitas

Teknologi otonom menimbulkan tantangan hukum baru. Menurut Sotoudehfar (2020), drone yang digunakan tanpa sistem identifikasi target dapat melanggar prinsip distinction dan proportionality. Maka, setiap penggunaan teknologi otonom harus disertai SOP verifikasi target dan audit digital untuk memastikan akuntabilitas tindakan militer.

KESIMPULAN

1. Prinsip gerilya klasik mobilitas, dukungan rakyat, dan desentralisasi tetap relevan pada era perang modern.
2. Teknologi otonom, drone, dan sistem AI memperkuat efektivitas operasi gerilya namun memunculkan isu etika dan legalitas.
3. Dominasi informasi dan siber menjadi dimensi strategis dalam memenangkan konflik modern.
4. Adaptasi taktis di medan urban dan kemandirian logistik menentukan daya tahan gerilya jangka panjang.

Saran

1. Kebijakan nasional: pembentukan unit kecil multi-domain yang menguasai teknologi drone dan literasi siber.
2. SOP etis: pengawasan legal penggunaan AI dan drone dalam konteks hukum humaniter internasional.
3. Ketahanan logistik: investasi dalam manufaktur lokal komponen drone dan sistem komunikasi terenkripsi.
4. **Strategi informasi nasional:** peningkatan kemampuan kontra-disinformasi dan integrasi komunikasi strategis ke operasi militer.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini berbasis literatur sekunder, sehingga tidak memuat data empiris lapangan. Selain itu, perkembangan teknologi yang cepat dapat mengubah relevansi temuan dalam beberapa tahun. Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan uji taktis empiris di konteks Indonesia dan Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bankov, B. (2018). Hybrid Warfare: How to Escape the Conceptual Gray Zone. *Journal of Strategic Studies*, 41(5), 712–728
- Baryshev, A. (2020). Hybrid Conflicts and Small Wars. *Journal of Strategic Studies*, 43(2), 310–333. <https://doi.org/10.1080/01402390.2019.1656712>
- Doctor, A. C. (2021). The Coercive Logic of Militant Drone Use. *Parameters*, 51(3), 25–38.
- Fadhilah, M. A., & Suryadi, D. (2019). Taktik Gerilya di Era Digital: Studi Kasus Konflik Urban. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 4(1), 55–72
- Genest, S. A. (2019). The Exploration of Terrorists' Use of Unmanned Aerial Systems. Johns Hopkins University Working Paper.
- Hybrid CoE. (2021). The Landscape of Hybrid Threats: Conceptual Framework. European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats.
- Khan, U. (2019). Challenges of Military Operations on Tomorrow's Battlefield. *Security Studies Journal*, 28(3), 290–305. <https://doi.org/10.1080/09636412.2019.1604982>
- Kitzen, M. (2020). Operations in Irregular Warfare. In *Handbook of Military Sciences*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02866-4_81-1

- Ministry of Defense RI. (2020). White Paper on National Defense: Resilience and Hybrid Threats. Jakarta: Kemhan RI.
- NATO. (2020). Hybrid Threats and Hybrid Warfare. NATO Review. <https://www.nato.int/docu/review/articles/2020>
- Prasetya, H. (2018). Operasi Informasi dalam Konflik Modern. *Jurnal Ilmu Politik dan Keamanan*, 5(2), 133–150. (SINTA 3).
- Prasetyo, R. (2020). Adaptasi Konsep Perang Asimetris dalam Era Informasi. *Jurnal Ilmu Pertahanan*, 6(2), 101–115. (SINTA 3).
- Rossiter, A. (2018). Drone Usage by Militant Groups: Exploring Variation in Adoption. *Defense & Security Analysis*, 34(2), 113–126. <https://doi.org/10.1080/14751798.2018.1478183>
- Rossiter, A. (2020). The Impact of Robotics and Autonomous Systems across the Conflict Spectrum. *Small Wars & Insurgencies*, 31(4), 691–700. <https://doi.org/10.1080/09592318.2020.1743481>
- Singer, P. W., & Brooking, E. T. (2018). *LikeWar: The Weaponization of Social Media*. Houghton Mifflin Harcourt.
- Sotoudehfar, S. (2020). Cheap Drones, Costly Consequences: Legal Issues in the Illicit Use of UAS. *Journal of International Law & Policy*, 12(1), 45–68.
- Tosini, N. (2021). The Tech Revolution and Irregular Warfare. CSIS Reports. <https://www.csis.org>
- Widodo, A., & Hidayat, S. (2021). Transformasi Strategi Gerilya di Era Modern. *Jurnal Pertahanan dan Keamanan Nasional*, 8(1), 77–91. (SINTA 4).
- Wivel, A. (2018). Urban Warfare and Insurgency: New Approaches. *Urban Studies Journal*.
- Yan, G. (2019). The Impact of Artificial Intelligence on Hybrid Warfare. *Small Wars & Insurgencies*, 31(4), 898–917. <https://doi.org/10.1080/09592318.2019.1682908>